

**PERAN KEKERABATAN DALAM PEMENANGAN PEMILIHAN**

**KEPALA DESA BUNGURASIH TAHUN 2016**

**Skripsi**

Disusun untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam  
Ilmu Filsafat Politik Islam



**Oleh :**

**FAISOL**

**NIM : E04212021**

**PRODI FILSAFAT POLITIK ISLAM**

**FAKULTAS USHULUDDIN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**SURABAYA**

**2018**

ABSTRAK

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : FAISOL

Nim : E04212021

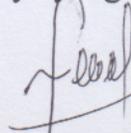
Jurusan : FILSAFAT POLITIK ISLAM

Judul : PERAN KEKERABATAN DALAM PEMENANGAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA BUNGURASIH  
TAHUN 2016

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Januari 2018

Saya yang menyatakan,

  
**FAISOL**  
**E04212021**



## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini oleh Faisol telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi,

Surabaya,

Mengesahkan,  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat



Dekan

Dr. Muhid, M.Ag

NIP. 196510021993031002

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. Aniek Nurhayati, M.Si

NIP 196909071994032001

Sekretaris,

M. Anas Fakhruddin, S.Th.I.M.Si

NIP. 198202102009011007

Penguji I

Dr. Khoirul Yahya, S.Ag,M.Si

NIP. 197202062007101003

Penguji II

Laili Bariroh, M.Si

NIP 197711032009122002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi Oleh:

Nama : FAISOL

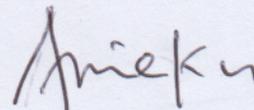
Nim : E04212021

Judul : **Peran Kekerabatan Dalam Pemenangan  
Pemilihan Kepala Desa Bungurasih Tahun 2016.**

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 23 Januari 2018

Pembimbing,



**Dr. Aniek Nurhayati, M.Si**

**NIP. 196909071994032001**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FAISOL  
NIM : E04212021  
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT / POLITIK ISLAM  
E-mail address : faisolkingdon@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PERAN KEKERABATAN DALAM PEMENANGAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA BUNBURASIH TAHUN 2016

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Februari 2018

Penulis

( FAISOL )

nama terang dan tanda tangan









*ironisme*. Di satu sisi, rakyat yang sangat apatis dan tidak peduli sehingga tingkat partisipatif masyarakat dalam Pilkadaes menurun. Apatis masyarakat ini justru dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk meraih jabatan dan kekayaan dengan memanfaatkan kekuasaan politik. Mereka adalah para elit desa yang ingin melanggengkan kekayaan dan kekuasaan agar tetap jatuh kepada garis keluarga. Sehingga fakta menunjukkan keberadaan Calon Kepala Desa masih didominasi oleh segelintir orang yang berkuasa dari golongan desa.

Kekuasaan, modal materi, dan modal sosial pada dasarnya sebagai alat untuk meraih kemenangan. Disini Calon Kepala Desa memainkan sumber kekuasaan untuk memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya. Dalam prakteknya Calon Kepala Desa membutuhkan sebuah cara yang efektif. Melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang seperti membuat rancangan strategi sampai pada memanfaatkan ikatan keluarga sebagai tim sukses untuk melanggengkan kekuasaan, sumber kekuasaan itu diharapkan dapat menarik dukungan yang lebih besar pula.

Fenomena majunya Calon Kepala Desa yang mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat sebelumnya, bahkan banyak dari warganya yang merupakan kerabat sebenarnya sangat ironis. Hal ini menunjukkan bahwa kursi Kepala Desa adalah jabatan yang menguntungkan, membawa berkah, dan bisa dijadikan sarana untuk mengumpulkan kekayaan serta melanggengkan kekuasaan untuk diturunkan kepada keluarga maupun



















Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Kajian teori, berisikan landasan teoritis terhadap Peran Kekerabatan Desa Bungurasih Dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Desa 2016, pengertian politik kekerabatan, data-data politik kekerabatan di Indonesia, konsep kekuasaan dan teori-teori tentang politik kekerabatan.

Bab III Metode penelitian, berisikan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data, metode verifikasi data.

Bab IV Penyajian data, berisikan gambaran umum lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, politik kekerabatan, serta gambaran kekerabatan yang ada Di Desa Bungurasih, analisis data, berisi analisis hasil pengamatan yang dikaitkan dengan teori-teori yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.





(power) yang dilakukan oleh anggota masyarakat tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu pula.

Definisi diatas juga menunjukkan bahwasannya proses politik sarat dengan konflik. Sedangkan konflik itu sendiri bisa diselesaikan dengan penggunaan kemampuan dan kekuasaan (power) masing-masing kelompok.

Oleh karenanya, paradigma proses berawal dari “terobosan” kondisi damai di dalam realitas sosial yang menghasilkan krisis sosial dan memaksa mobilisasi kekuatan besar untuk menerobos realitas sosial yang damai tersebut. Jika konflik berlanjut, maka akan memaksa agen untuk mengembangkan dan menyebarkan mekanisme perbaikan atas munculnya konflik tersebut. Pada akhirnya secara perlahan, kondisi damai akan diwujudkan antara pihak-pihak yang berkonflik. Oleh karenanya Kurtz pada akhirnya menekankan bahwa proses ini merupakan bagian dari penyelesaian masalah (solution) atas berbagai konflik yang terjadi setiap hari.

Kelemahan paradigma proses bukan tanpa masalah, sebagai fungsionalisme yang implisit dalam “model dinamis” dari sosial drama. Beberapa konsep perubahan (dinamis) yang lain, seperti wajah politik dan arena politik, begitu *ambigu* dan sulit untuk lapangan, diterapkan ide dari wilayah dan arena politik terdengar menarik, tetapi dalam praktek penerapannya penuh dengan kesulitan metodologi. Hal ini sangat sulit

untuk menerapkan ide wilayah lapangan dan arena situasi institusional yang komplit, dimana level lokal wilayah politik dan arena masyarakat modern melengkapi dengan level dan melebihi lain dari organisasi politik negara dan level negara maju. Hari ini, jika ide ini digunakan secara keseluruhan, maka ide ini hanya akan berlaku sebagai hiasan dalam struktur yang sulit untuk objek struktur.

Dalam paradigma proses, pelajaran tentang studi faksi-faksi diharapkan menjadi pengantar kedalam ikatan dari tindakan politik dan konflik. Hal ini tidak terjadi, beberapa penulis misalnya Bailey, menggunakan ide yang *cooperative* untuk menganalisa proses-proses politik yang bermacam-macam. Tetapi, meskipun ide atau gugatan Bailey tentang faksi-faksi sebagai sebuah kelompok, tanggapan tidak menjadi paling menarik perhatian dalam pemikiran para antropologi politik.

Ada alasan-alasan untuk hal ini. Dalam bagian ini karena mengetahui macam-macam faksi atau golongan-golongan ini, sebuah praktek fungsional menjadi lebih penting dari pada menyelidiki perubahan politik mereka. Terkait teori politik kekerabatan peneliti menggunakan kacamata Antropologi *Political Kinship* oleh Donal V Kurtz.







dalam rumah tangga *poligini* dari pada pria dewasa, dan kepala negara *pra* Industri yang memungkinkan untuk melakukan hal yang sama dari pada pemimpin.

Meskipun demikian, poligami bisa mahal secara ekonomi, dan emosional. Istri mungkin tidak akur, suami mungkin memiliki masalah dengan satu atau lebih dari satu istri. Kecemburuan dapat membuat ketegangan. Anak-anak dan istri yang berbeda dapat menimbulkan masalah serius mengenai kesuksesan di kantor. Untuk mengurangi ini dan masalah lain yang berkaitan dengan *poligami*, laki-laki diharapkan untuk memberikan keadilan kepada masing-masing istri.

## 5. Peringkat Garis Keturunan

Sebuah Remagen mengacu pada struktur *agamy*, *ambilocal*, dan *ambilineal* asosiasi keturunan atau garis keturunan yang berada pada garis peringkat sebuah hirarki. Setiap garis keturunan dari Remagen merupakan sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang masing-masing bisa melacak keturunan untuk nenek moyang yang sama. *Ramage* adalah subjek segmentasi dan pembagian dan jika satu kata bisa menyarankan dinamika sosial dan politik dari *ramage* akan menjadi fleksibel yang merupakan produk dari prinsip-prinsip *agamy*, *ambilocality* dan segmentasi.















Studi mengenai dinasti politik telah banyak dilakukan para ilmuwan politik di berbagai negara. Beberapa peneliti yang tulisannya banyak dirujuk antara lain Pablo Querubin, Mark R. Thompson, Ernesto Dal Bo, Jason Snyder, Alfred W. McCoy, Donn M. Kurtz, Yasushi Asako, dan Stephen Hess.

Pada umumnya posisi kajian mengenai isu dinasti politik ini berada dalam konteks perbincangan mengenai politik kekerabatan (keluarga) sebagaimana dapat dibaca dalam cara bagaimana para ahli itu mendefinisikan dinasti politik. Pablo Querubin mendefinisikan dinasti politik sebagai sejumlah kecil keluarga yang mendominasi distribusi kekuasaan dalam area geografis tertentu. Mark R. Thompson menjelaskan dinasti politik hanya sebagai jenis lain dari transisi (peralihan) kekuasaan politik, langsung maupun tidak langsung, yang melibatkan anggota keluarga. Definisi ini tidak jauh berbeda dengan yang dirumuskan Yasushi Asako yang mendefinisikan dinasti politik secara sederhana sebagai sekelompok politisi yang mewarisi jabatan publik dari salah satu anggota keluarga mereka.

Kebangkitan dinasti politik, sebagaimana ditunjukkan oleh banyak hasil studi yang dilakukan para ahli diberbagai negara memang memiliki hubungan sangat erat dengan kepentingan keluarga atau politik kekerabatan. Kepentingan keluarga kerap, jika tidak selalu, menjadi basis muasal pertumbuhan, perkembangan dan perluasan dinasti politik dalam suatu sistim politik demokrasi. Dalam tradisi politik kekerabatan anggota

keluarga yang sudah menjadi penguasa atau menduduki jabatan publik pada umumnya akan melakukan praktik nepotisme dengan memberikan berbagai perlakuan istimewa kepada anggota keluarga atau kerabatnya, bukan untuk mensejahterakan rakyat dan memajukan daerahnya, melainkan dalam rangka membangun dan memperkuat jejaring kekuasaannya. Dari sinilah kemudian embrio dinasti politik itu muncul.

Dalam studi Eisenstadt S.N. dan Roniger Luis dikemukakan, bahwa pemberian prioritas kepada anggota keluarga dan kerabat dalam kehidupan politik itu didasarkan pada 4 (empat) argumentasi, yakni: (1) Kepercayaan (*trusty*), maksudnya bahwa keluarga atau kerabat lebih dapat dipercaya dan tak mungkin berkhianat seperti yang lazim dilakukan politisi pemburu kekuasaan; (2) Kesetiaan (*loyalty*), bahwa kerabat akan jauh memiliki loyalitas tinggi dalam konteks menjalankan semua tugas politik terutama dalam hal menjaga wibawa dan kehormatan kerabat besar ketimbang orang lain; (3) Solidaritas (*solidarity*), artinya kerabat dipastikan jauh memiliki tingkat solidaritas yang tangguh terutama dalam menolong klan keluarga besar dari kebangkrutan kekuasaan dan kekayaan ketimbang mereka yang bukan dari kalangan kerabat; (4) Proteksi (*protection*), hal ini terkait dengan kepentingan mempertahankan gengsi dan kehormatan keluarga besar. Mereka yang berasal dari klan yang sama akan cenderung mampu menjaga apa yang telah dimiliki keluarga ketimbang orang lain. Secara teoritik praktik dinasti politik menimbulkan berbagai ancaman problematis dalam

kehidupan politik di aras lokal. Dalam kerangka konsolidasi demokrasi lokal, praktik dinasti politik mempersempit ruang partisipasi publik sekaligus menegasikan salah satu prinsip dasar demokrasi, yakni kesetaraan politik. Selain itu, dinasti politik juga hanya akan memperkokoh gejala oligarkis di daerah yang berpotensi melemahkan mekanisme check and balance karena jabatan-jabatan politik dikuasai oleh satu keluarga. Dalam pandangan Amich Alhumami, peneliti sosial di University of Sussex Inggris politik kekerabatan atau dinasti politik tidak sesuai dengan prinsip meritokrasi. Sebab, proses rekrutmen didasarkan pada sentimen kekeluargaan, bukan kompetensi. Menurutnya, jika terus berlanjut, gejala ini bisa kontraproduktif bagi ikhtiar membangun sistem demokrasi modern. Dominasi kekuasaan oleh sekelompok elit lokal atau keluarga yang demikian itu pada akhirnya akan menimbulkan kerawanan terjadinya berbagai bentuk penyalahgunaan (korupsi) kekuasaan politik maupun ekonomi.

Senada dengan pandangan di atas, merujuk pada kajian John T. Sidel tentang local bossism misalnya, dapat disimpulkan bahwa kehadiran model-model oligarki, personalisme dan klientilisme yang kesemuanya menjadi ruh (esensi) dari karakteristik dinasti politik telah menghambat proses konsolidasi dan pembangunan demokrasi di tingkat lokal. Dalam bukunya yang lain, Sidel bahkan menuding praktik dinasti sebagai pihak paling bertanggung jawab atas maraknya gejala personalisasi politik dan lemahnya kapasitas negara dan institusi politik.





4.	Tangerang	Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar adalah anak dari mantan Bupati Tangerang sebelumnya, Ismet Iskandar
5.	Bangkalan	Bupati Bangkalan Mohammad Makmun Ibnu Fuad adalah anak dari mantan Bupati Bangkalan sebelumnya, Fuad Amin
6.	Kutai Kartanegara	Bupati Kukar, Rita Widyasari adalah anak dari mantan Bupati kukar sebelumnya, Syaukani Hasan Rais.
7.	Maluku Tengah	Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua adalah kakak dari mantan Bupati Maluku tengah sebelumnya, Abdullah Tuasika
8.	Bantul	Bupati Bantul Sri Suryawidati adalah istri dari mantan Bupati Bantul sebelumnya, Idham Samawi.
9.	Kendal	Bupati Kendal Widya Kandi Susanti adalah istri dari mantan Bupati kendal sebelumnya, Hendri Boedoro.
10.	Kabupaten Bandung	Bupati Bandung Dadang Naser adalah menantu dari Bupati Bandung sebelumnya, Obar Sobama
11.	Cimahi	Wali kota Cimahi, Ati Suhari adalah istri dari mantan Wali Kota Cimahi sebelumnya, Itoc Tochija
12.	Probolinggo	Wali kota Probolinggo Puput Tantriana adalah istri dari mantan Wali Kota Probolinggo sebelumnya, Hasan Aminudin
13.	Kediri	Bupati Kediri Haryanti Sutrisno adalah istri dari mantan Bupati Kediri sebelumnya, Sutrisno
14.	Barru	Bupati Barru Andi Idris Syukur adalah anak dari Bupati Barru sebelumnya
15.	Tabanan	Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti adalah anak dari mantan Bupati Tabanan sebelumnya, Adi Wiryatama
16.	Banten	Gubernur Banten Atut Choisyah, merupakan kakak kandung Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah. Kakak tiri Wali Kota Serang Tubagus Haerul Jaman, kakak ipar Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany Anak tiri Wakil Bupati Pandeglang Heyani
17.	Lampung	Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP, merupakan ayah dari Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza. Ayah dari Wakil Bupati











berbatasan dengan Desa Ketegan, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Kedungrejo.

2. Desa Bungurasih terdapat makam Ki Ageng Ibrahim Jaelani yang masih berhubungan dengan Sunan Ampel Raden Rahmat.
3. Meskipun Desa Bungurasih merupakan daerah transisi karena adanya Terminal Purabaya, Mall Citi Tomorrow, Ramayana, Surabaya Carnival, bersampingan lingkungan Industri seperti Gudang Garam, Desa Bungurasih masih mempertahankan tradisi budaya nenek moyang seperti slametan, megengan, gotong royong.
4. Desa Bungurasih dipimpin oleh Kepala Desa perempuan periode 2010-2016 sampai dengan sekarang yakni Ibu Eni Rosida Hartiwi.
5. Terdapat anomali Ibu Eni menjalankan pemerintahan desa tanpa adanya sekertaris desa dan kasih pembangunan merangkap bendahara desa.
6. Terdapat fakta mengatakan Ibu Eni keturunan pendiri punden desa.
7. Sejarah mencatat Ayah beliau H.Usman Ali juga menjabat kursi Kepala Desa tahun 1970-1980, sedangkan suami beliau Ashori Sujoko juga menjabat Kepala Desa periode tahun 1980-2000.















- c. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan.
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Yang ingin diketahui dari perbandingan ini adalah mengetahui alasan-alasan apa yang melatar belakangi adanya perbedaan tersebut(jika ada perbedaan) bukan titik temu atau kesamaannya sehingga dapat dimengerti dan mendukung validitas data. Jadi triangulasi adalah cara terbaik untuk menghilangkan perbedan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi saat mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Untuk itu peneliti dapat melakukannya dengan jalan: (1) mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan dan (2) mengeceknya dengan berbagai sumber.













wilayah sebagian tanahnya menjadi milik pemerintah yaitu Terminal yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, Jalan Tol Surabaya-Malang, adapun juga milik swasta yakni PT.Ramayana. Jika dilihat secara kasat mata, memang banyak dari masyarakat Desa Bungurasih ini, termasuk kalangan menengah keatas. Karena sebagian dari warganya pun ada juga yang berprofesi sebagai guru swasta, guru PNS, karyawan PNS, wiraswasta, swasta dan banyak juga pedagang dan lainnya. Tidak hanya itu ada juga sebagian dari masyarakat yang bekerja di luar kota tempat tinggal mereka. Desa Bungurasih letaknya yang berdekatan dengan terminal terbesar menjadikan sebagian warganya untuk berwirausaha dengan membangun lahan parkir, kos-kosan, sampai ponton umum.

Tidak hanya itu, meskipun demikian tidak sedikit penduduknya yang juga kekurangan dari segi perekonomiannya. Akibat dari pembangunan dan kemajuan membuat Desa Bungurasih harus menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan dan sosial itu, terminal Purabaya turut berperan dalam upaya pemaksaan, penyesuaian secara cepat itu dengan tanpa diimbangi Sumber Daya Manusia sehingga pada akhirnya SDM masyarakat yang notabene warga Desa Bungurasih yang kurang siap hanya menjadi bagian tidak penting di Purabaya; asongan, tukang ojek bahkan pengamen

Saat ini di Desa Bungurasih terdapat penduduk yang bukan warga asli penduduk Desa Bungurasih, mereka adalah pendatang dari







tradisi memperingati 40 hari kematian, tradisi memperingati 100 hari kematian, tradisi memperingati 1000 hari kematian. Tradisi-tradisi tersebut pada intinya merupakan tradisi mendoakan orang yang meninggal agar dapat diterima di Sisi Allah SWT. Tradisi-tradisi tersebut umumnya dilakukan di Desa Bungurasih. Karena dalam tradisi-tradisi diatas tersimpan makna keagamaan, sebagaimana dalam tradisi kematian, yang didalamnya berisi doa untuk orang yang meninggal.

### **c. Gotong Royong**

Selain budaya yang bersifat *kejawen*, ada pula yang dinamakan dengan budaya gotong royong. Budaya gotong-royong ini dilakukan dalam rangka meningkatkan rasa tanggung rasa serta kerukunan antar warga. Budaya gotong royong ini biasanya dilakukan dengan cara kerja bakti baik dalam perbaikan jalan, pembangunan rumah maupun yang lainnya. Dan biasanya untuk mengumpulkan warga dengan menyebarkan selebaran kertas atau undangan pemberitahuan. Adapun acara kerjabakti tersebut biasanya dilakukan pada pagi hari tepatnya di hari Minggu.



pada pemimpin yang terlibat dalam kuantitas yang kecil di mana para bawahannya secara aktif menentukan tujuan serta penyelesaian masalah yang dihadapi. Sedangkan karismatik merupakan seorang yang visioner yang mampu mempengaruhi pilihan masyarakat berdasarkan pada pesona yang melekat pada dirinya. Dalam menjalankan tugas serta fungsinya terdapat koordinasi pekerjaan pada semua bawahan, dan ditekankan pada rasa tanggung jawab internal (pada diri sendiri) dan kerjasama yang baik. kekuatan kepemimpinan kharismatik dan tipe kepemimpinan *laissez faire* tidak terletak pada pemimpinnya akan tetapi terletak pada partisipasi aktif dari setiap warga kelompok. Kepemimpinan *laissez faire* dan kharismatik menghargai potensi setiap individu, serta mau mendengarkan nasehat dan sugesti bawahan. Bersedia mengakui keahlian para spesialis dengan bidangnya masing-masing. Mampu memanfaatkan kapasitas setiap anggota seefektif mungkin pada saat-saat dan kondisi yang tepat

















sistem demokrasi, jadi sebenarnya politik kekerabatan tidak diperbolehkan di negara kita.

Politik kekerabatan yakni dimana sesuatu kekuasaan yang tidak hanya turun temurun dipegang dan dipertahankan oleh keluarga tapi tali persaudaraan diikat oleh satu garis keturunan marga atau nasab dari banyak keluarga sehingga dimana semua kerabat atau keluarga turut menerima keberhasilan dari salah satu keluarga yang meraih. Tidak dipungkiri adanya keluarga yang berhasil meraih kekuasaan dalam suatu daerah maka secara otomatis kerabat menjadi elit dikalangan daerah tersebut. Indonesia khususnya tidak lagi menganut sistem monarki atau sistem kerajaan yang bisa mengambil alih kekuasaan secara turun temurun dan kekeluargaan. Namun realita yang terjadi demokrasi masih jauh dari kata sempurna untuk mengambil alih kekuasaan terkesan dari undang-undang, peraturan pemerintah, maupun tata tertib pemilihan yang menjadi landasan pelaksanaannya hanyalah sebatas aturan formal penuh kelemahan dan tidak menjamin rekrutmen politik yang demokratis, obyektif dan rasional. Karena jika kita melihat dari beberapa kasus yang mana kekuasaan di daerah terkesan di atur dan di setting untuk beberapa elit saja. Contohnya masih hangat yakni politik dinasti oleh keluarga Ratu Atut Banten bahkan level partai besar yang masih dipegang oleh elit keluarga.











Kasian, Bungurasih Timur, RW 2 Bungurasih Barat atau nomor(1) juga mayoritas kerabat di wilayah sini Rumah Ibu Eni, serta RW 03 Bungurasih Tengah juga mayoritas kerabat dimna dalam peta diatas nomor(2) rumah dari Bapak Ali selaku adik ipar dan Kasih Pembangunan.

Desa Bungurasih terletak di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo letaknya pun strategis, Desa Bungurasih ini adalah perbatasan kota antara kota Surabaya-Sidorjo dan juga dekat dengan Ibu kota Kecamatan. Desa Bungurasih terdiri dari 5 ke RW-an yaitu RW 1 Bungurasih yang dulunya adalah Dukuh Kasian, RW 2 Bungurasih Barat, RW 3 Bungurasih Tengah, RW 4 Bungurasih Utara, RW 5 di Perum Hamada yang berbatasan dengan kelurahan Menanggal. Disini tokoh Bungurasih tengah menceritakan dan menulis sudah melakukan penelusuran dimana terbukti RW 1 sebagian besar mengenal Bu Eni karena mayoritas kerabat, RW 02 Bungurasih barat juga mayoritas kerabat karena rumah Bu Eni berada di wilayah sini, dan RW 3 adalah hampir semuanya adalah keluarga Ibu Eni di RW 3 sinilah rumah Pak Ali selaku Bendahara dan Kasih pembangunan. Di RW 4 kerabatnya tidak berada dalam satu wilayah melainkan terpisah-pisah dan merupakan tim sukses Ibu Eni saat Pemilihan Kepala Desa berlangsung.

Kekerabatan yang terjadi di Desa Bungurasih seperti teori kekerabatan di atas yakni *kindret* yaitu berkumpulnya orang-orang yang



Dari penjelasan tabel diatas bisa diketahui bahwasannya Ibu Eni mempunyai garis keturunan dari Kepala Desa pendahulu yakni Ayahnya, Suami juga pernah menjabat, bahkan kerabat juga pernah menjabat Kepala Desa. Dalam masa kepemimpinan Ibu Eni melakukan pembagian kekuasaan birokrasi meskipun peneliti tidak bisa maksimal mengungkap. Kepengurusan birokrasi desa tanpa adanya sekertaris serta memanfaatkan kepandaian Pak Ali selaku Adik Ipar yakni merangkap Bendahara dan Kasih Bangunan.

Seperti kajian teori dalam studi Eisenstadt S.N. dan Roniger Luis dikemukakan, bahwa pemberian prioritas kepada anggota keluarga dan kerabat dalam kehidupan politik itu didasarkan pada 4 (empat) argumentasi, yakni: (1) Kepercayaan (trusty), maksudnya bahwa keluarga atau kerabat lebih dapat dipercaya dan tak mungkin berkhianat seperti yang lazim dilakukan politisi pemburu kekuasaan; (2) Kesetiaan (loyalty), bahwa kerabat akan jauh memiliki loyalitas tinggi dalam konteks menjalankan semua tugas politik terutama dalam hal menjaga wibawa dan kehormatan kerabat besar ketimbang orang lain; (3) Solidaritas (solidarity), artinya kerabat dipastikan jauh memiliki tingkat solidaritas yang tangguh terutama dalam menolong klan keluarga besar dari kebangkrutan kekuasaan dan kekayaan ketimbang mereka yang bukan dari kalangan kerabat; (4) Proteksi (protection), hal ini terkait dengan kepentingan mempertahankan gengsi dan kehormatan keluarga







desa, sarana-sarana umum seperti ambulans desa sehingga pada tahun 2016 masyarakat umum juga banyak yang memilihnya.

Dalam Pilkada 2016 peran kekerabatan biasanya selalu berdampingan dengan kekuasaan sehingga kekuasaan dipandang sebagai suatu gejala yang selalu terdapat dalam proses politik, namun para ilmuwan politik tidak ada yang sepakat mengenai perumusan pengertian kekuasaan. Bahkan beberapa diantaranya menyarankan agar konsep kekuasaan ditinggalkan dengan alasan bersifat kabur dan selalu berkonotasi emosional. Namun tampaknya politik tanpa kekuasaan apalagi sekarang fenomena politik kekerabatan ibarat agama tanpa moral. Karena modern ini banyak para aktor politik yang selalu melibatkan keluarganya untuk berkecimbung juga dalam dunia politik hal ini terlihat diberbagai daerah menjelang Pemilihan kepala daerah yang serentak dilakukan pada akhir-akhir ini. Berikut ini adalah hasil peneliti wawancara dengan warga Bungurasih penilaian terhadap Ibu Eni, penjelasan salah satu tokoh masyarakat Bungurasih tengah :

“Di Desa Bungurasih memang mayoritas kerabat Ibu Eni Mas jadi semacam mempunyai dinasti dan jika ada pemilihan kekerabatan di fungsikan sebagai tim sukses dengan kata lain mengajak tetangganya memilih Ibu Eni”

Dari penjelasan warga yang menyatakan Ibu Eni tegas, baik, banyak programnya peneliti setuju dengan pernyataan tersebut, namun dalam hasil penelitian jika dilihat dari hasil wawancara sebelumnya

program Ibu Eni tersebut melanjutkan program suaminya, bahkan suaminya sering terlibat maka gugur pernyataan di atas. Jika dilihat dari birokrasi kita bisa mengetahui bahwasanya kepemimpinan Ibu Eni tanpa adanya Sekertaris Desa, kerabat adik ipar memegang kendali atas Bendahara dan Kasi Pembangunan adapun bagian Kasi Umum juga dipegang kerabat. Maka bisa disimpulkan gaya kepemimpinan Ibu Eni bebas atau *Laissez Faire* dimana pemimpin tidak memimpin atau mengendalikan bawahannya sepenuhnya, tidak ikut serta dengan bawahannya. Dalam teori politik kekerabatan model seperti ini sering ditemukan karena demi berlangsungnya roda pemerintahan dan ketengan dalam desa. Adapun kutipan wawancara dengan salah satu tokoh agama Bungurasih Timur:

“Bu Eni di Bungurasih memang orangnya baik, banyak sekali programnya. Suami Bu Eni dulu juga pernah menjadi Kepala Desa tidak menutupi kebenaran program Ibu Eni dari pemikiran suami, bagaimanapun istri kalau ada permasalahan harus membicarakan dengan suami, jadi wajar.

Dari paparan diatas peneliti bisa menyimpulkan yakni memang gaya kepemimpinan Ibu Eni, baik, banyak ide atau program yang dijalankan, banyaknya pembangunan yang terlealisasi yakni gedung serbaguna, merenovasi kantor Kepala Desa. Adapun salah salah satu kerabat menjelaskan terkait peran kerabat:





Bisa disimpulkan kekerabatan Desa Bungurasih selain menjadi tim sukses mempengaruhi tetangga, sisi lain menginformasikan bahwasannya jika memilih Ibu Eni mendapatkan imbalan berupa hadiah. Artinya Ibu Eni juga menggunakan selain modal sosial juga menggunakan modal materi sehingga kerabat dan mayoritas warga memilihnya.

Tidak menutupi kemungkinan bahwasanya suatu tingkatan wilayah desa masih menggunakan peran kekerabatan dalam seleksi demokrasi karena ini adalah cara yang sah karena warga yang memilih adalah kerabat dari calon atau petahana kepala desa. Desa Bungurasih yang sudah berkembang di samping Kota Besar Surabaya dan Desa yang terkenal dengan ikon Terminal Purabaya namun dalam hal pemerintahan masih dipegang oleh satu garis keturunan dan warganya mayoritas kerabat, keluarga besar yang hidup bersama dan berdampingan dan menjadi tim sukses apabila kerabat mencalonkan diri sebagai pemimpin di desa tersebut.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk kekerabatan Desa Bungurasih dimana kekuasaan Kepala Desa dipegang garis keturunan pendiri punden desa termasuk yang saat ini yakni Ibu Eni. Adapun kekerabatan Ibu Eni yakni berada di RW 01 Bungurasih atau yang dulunya dukuh Kasian, RW 02 Bungurasih Barat, RW 03 Bungurasih Tengah yang setiap RW ada hampir 100 kartu keluarga. Jadi bisa dikatakan kekerabatan yang terdapat dalam Desa Bungurasih keluarga yang luas dari keturunan ayah atau ibu atau disebut bilateral juga bisa dikatakan *kekerabatan kindred* dimana kesatuan kerabat yang melakukan interaksi atau berkumpul antar anggota kerabat pada waktu tertentu. Dalam kehidupan politik memang sudah terjadi pengkaderan dari saudara-saudara yang lebih terdahulu memimpin meskipun tidak terlihat secara masif namun sudah disiapkan untuk memimpin Desa Bungurasih selanjutnya. Bahkan demi mempertahankan kekerabatan pemerintah desa tidak mau menjadikan Desa Bungurasih menjadi Kecamatan karena jika









